



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFUL BACHRI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
3. NHK : 413368

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/154 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/83 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/293 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **909.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
4. MOBIL, HONDA CRV 1.5T PRESTIGE CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **118.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.962.524.910**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

6.940.024.910

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.940.024.910

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.